



ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kornelius A. Bawamenewi¹⁾

¹⁾ Manejemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Email: korneliubamen@gmail.com

Abstract

Community participation is one of the fundamental principles of regional development aimed at promoting participatory, transparent, and accountable governance. This study aims to analyze the level of community participation in regional development planning in Nias Regency and to identify the factors influencing such participation. The study employed a quantitative approach using a descriptive research method. Data were collected through questionnaires distributed to 150 respondents selected using purposive sampling, supported by interviews, observations, and document analysis. The data were analyzed using descriptive statistics, including mean scores, percentages, and the Community Participation Index. The findings indicate that the level of community participation falls within the high category, with a participation index of 77.4%. The highest score was found in the dimension of participation in utilizing development outcomes, while participation in development evaluation received the lowest score. Factors influencing community participation include the culture of mutual cooperation (*gotong royong*), information transparency, village government leadership, educational level, access to information, public awareness, and economic conditions. The study concludes that community participation in Nias Regency has been implemented effectively; however, greater efforts are required to strengthen community involvement, particularly in the stages of development evaluation and decision-making, in order to achieve more inclusive, effective, and sustainable regional development planning.

Keywords: Community Participation; Development Planning; Musrenbang; Regional Development; Nias Regency.

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, serta didukung oleh wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif melalui perhitungan rata-rata, persentase, dan indeks partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori tinggi dengan nilai indeks sebesar 77,4%. Dimensi pemanfaatan hasil pembangunan memperoleh nilai tertinggi, sedangkan partisipasi dalam evaluasi pembangunan merupakan dimensi dengan nilai terendah. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi budaya gotong royong, transparansi informasi, kepemimpinan pemerintah desa, tingkat pendidikan, akses informasi, kesadaran masyarakat, dan kondisi ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Nias telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat, khususnya pada tahap evaluasi pembangunan dan pengambilan keputusan, guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Pembangunan; Musrenbang; Pembangunan Daerah; Kabupaten Nias.



PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Namun demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyusun program kerja, melainkan juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis karena mampu menciptakan pembangunan yang lebih responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan publik (Conyers & Hills, 1994; Cohen & Uphoff, 1980).

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme yang partisipatif. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan (Republik Indonesia, 2004; Republik Indonesia, 2014).

Secara konseptual, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam proses identifikasi masalah, penyusunan usulan program, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan (Cohen & Uphoff, 1980). Arnstein (1969) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan mulai dari non-participation, tokenism, hingga citizen power, yang menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari besarnya pengaruh masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar peluang terciptanya pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Nias sebagai salah satu daerah kepulauan di Provinsi Sumatera Utara memiliki karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi wilayah yang sebagian besar terdiri atas daerah pedesaan, keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas antarwilayah yang belum merata, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang

masih perlu ditingkatkan menjadikan proses perencanaan pembangunan membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif. Aspirasi masyarakat lokal menjadi sumber informasi penting dalam menentukan kebutuhan prioritas pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi faktor strategis dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat di Kabupaten Nias.

Meskipun mekanisme partisipatif melalui Musrenbang telah dilaksanakan setiap tahun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan akses informasi, dominasi elit lokal, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta terbatasnya tindak lanjut terhadap usulan masyarakat sering kali menyebabkan partisipasi hanya bersifat formalitas tanpa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembangunan (Arnstein, 1969; World Bank, 1996). Akibatnya, sebagian program pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat sehingga efektivitas pembangunan menjadi kurang optimal.

Fenomena tersebut juga masih ditemukan di berbagai wilayah Kabupaten Nias. Dalam praktiknya, tidak seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang dapat diakomodasi ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) karena keterbatasan anggaran, prioritas kebijakan pemerintah, maupun pertimbangan teknis lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan apabila aspirasi yang disampaikan tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas. Selain itu, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, seperti perempuan, pemuda, kelompok miskin, maupun masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Dari perspektif teori pembangunan partisipatif, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan good governance menempatkan partisipasi sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersama dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum (UNDP, 1997). Oleh karena itu, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat tidak hanya bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan, meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership), serta mendorong keberlanjutan hasil pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Nias" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, serta mengkaji



berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian pembangunan partisipatif serta menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah secara objektif berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Nias merupakan daerah yang secara rutin melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai implementasi sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

Penelitian dilaksanakan selama Januari–Maret 2026, yang meliputi tahap persiapan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat yang pernah mengikuti proses Musrenbang desa maupun kecamatan di Kabupaten Nias, yang terdiri atas unsur:

1. Tokoh masyarakat;
2. Perangkat desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Tokoh perempuan;
5. Tokoh pemuda;
6. Kelompok tani dan nelayan;
7. Pelaku UMKM; serta
8. Perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

1. Berusia minimal 17 tahun.
2. Berdomisili di Kabupaten Nias.
3. Pernah mengikuti Musrenbang sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun terakhir.
4. Bersedia menjadi responden penelitian.

Jumlah responden penelitian ditetapkan sebanyak 150 orang, yang dianggap telah memenuhi kebutuhan analisis

deskriptif dan memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung melalui:
 - a) Penyebaran kuesioner kepada responden;
 - b) Wawancara dengan aparat pemerintah daerah, perangkat desa, dan tokoh masyarakat;
 - c) Observasi terhadap pelaksanaan Musrenbang.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari:
 - a) Dokumen RKPD Kabupaten Nias;
 - b) RPJMD Kabupaten Nias;
 - c) Dokumen hasil Musrenbang;
 - d) Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS);
 - e) Peraturan perundang-undangan;
 - f) Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Kuesioner, menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi responden terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
2. Wawancara, dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses perencanaan pembangunan.
3. Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung proses Musrenbang dan bentuk keterlibatan masyarakat.
4. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penelitian.

2.6 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel utama, yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Variabel tersebut diukur berdasarkan konsep Cohen dan Uphoff (1980), yang terdiri atas empat dimensi sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator konsep Cohen dan Uphoff

Variabel	Indikator	Acuan Teori
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Cohen & Uphoff (1980)
	Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Cohen & Uphoff (1980)
	Partisipasi dalam	Cohen & Uphoff (1980)



pemanfaatan hasil pembangunan	
Partisipasi dalam evaluasi pembangunan	Cohen & Uphoff (1980)

Masing-masing indikator diukur menggunakan beberapa butir pertanyaan dengan skala Likert sebagai berikut:

- 5 = Sangat Setuju
- 4 = Setuju
- 3 = Netral
- 2 = Tidak Setuju
- 1 = Sangat Tidak Setuju

2.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen diuji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Product Moment Pearson dengan ketentuan:

- Jika nilai r hitung $> r$ tabel, maka item dinyatakan valid.
- Jika nilai r hitung $\leq r$ tabel, maka item dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- $\alpha \geq 0,70$ = reliabel.
- $\alpha < 0,70$ = belum reliabel.

a. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak statistik, seperti IBM SPSS Statistics.

Tahapan analisis meliputi:

1. Analisis statistik deskriptif, untuk menggambarkan karakteristik responden dan tingkat partisipasi masyarakat melalui nilai rata-rata (mean), persentase, frekuensi, dan standar deviasi.
2. Analisis Indeks Tingkat Partisipasi Masyarakat, menggunakan rumus:

$$\text{Indeks Partisipasi} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimum}} \times 100\%$$

Tabel 2. Indeks Partisipasi

Persentase	Kategori
81–100%	Sangat Tinggi
61–80%	Tinggi
41–60%	Sedang
21–40%	Rendah
$\leq 20\%$	Sangat Rendah

3. Analisis tabulasi silang (cross tabulation) digunakan untuk melihat kecenderungan tingkat partisipasi berdasarkan karakteristik responden, seperti jenis

kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman mengikuti Musrenbang.

4. Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori partisipasi masyarakat, konsep good governance, serta hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

2.8 Alur Penelitian

Tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah penelitian.
2. Studi literatur.
3. Penyusunan instrumen penelitian.
4. Uji validitas dan reliabilitas instrumen.
5. Pengumpulan data primer dan sekunder.
6. Pengolahan data.
7. Analisis data.
8. Pembahasan hasil penelitian.
9. Penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 150 responden yang merupakan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Nias. Responden terdiri atas tokoh masyarakat, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh perempuan, tokoh pemuda, kelompok tani, pelaku UMKM, dan unsur masyarakat lainnya.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	88	58,7
Perempuan	62	41,3
Usia		
17–30 tahun	28	18,7
31–45 tahun	57	38,0
46–60 tahun	46	30,7
>60 tahun	19	12,6
Pendidikan		
SD	24	16,0
SMP	33	22,0
SMA	61	40,7
Perguruan Tinggi	32	21,3

Berdasarkan Tabel 3, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (58,7%) dengan kelompok usia dominan 31–45 tahun (38,0%). Tingkat pendidikan responden didominasi lulusan SMA (40,7%), menunjukkan bahwa sebagian besar peserta Musrenbang memiliki kemampuan dasar untuk memahami proses perencanaan pembangunan dan menyampaikan aspirasi.



3.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat diukur menggunakan empat indikator yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff (1980), yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
Pengambilan keputusan	3,95	79,0	Tinggi
Pelaksanaan pembangunan	3,87	77,4	Tinggi
Pemanfaatan hasil pembangunan	4,12	82,4	Sangat Tinggi
Evaluasi pembangunan	3,54	70,8	Tinggi
Rata-rata	3,87	77,4	Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 77,4%. Indikator dengan nilai tertinggi adalah pemanfaatan hasil pembangunan (82,4%), sedangkan indikator terendah adalah partisipasi dalam evaluasi pembangunan (70,8%).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak terlibat sebagai penerima manfaat pembangunan dibandingkan sebagai pihak yang terlibat dalam proses evaluasi program.

3.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Sebagian besar responden menyatakan aktif mengikuti Musrenbang desa maupun kecamatan serta memberikan usulan pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya. Aspirasi yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, sarana air bersih, peningkatan layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi ke dalam RKPD karena keterbatasan anggaran daerah dan penyesuaian dengan prioritas pembangunan pemerintah.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme Musrenbang telah memberikan ruang partisipasi, namun kualitas partisipasi masih berada pada tingkat consultation dan placation menurut teori Arnstein (1969), karena keputusan akhir masih didominasi oleh pemerintah daerah.

3.4 Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tergolong tinggi (77,4%). Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat antara lain:

1. Gotong royong dalam pembangunan infrastruktur desa.
2. Penyediaan tenaga kerja lokal.

3. Penyediaan lahan secara sukarela pada beberapa proyek.

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Budaya gotong royong yang masih kuat di Kabupaten Nias menjadi salah satu faktor yang mendukung tingginya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3.5 Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Indikator ini memperoleh nilai tertinggi (82,4%). Masyarakat merasakan manfaat nyata dari pembangunan, terutama pada:

1. peningkatan akses jalan,
2. kemudahan transportasi,
3. pelayanan kesehatan,
4. fasilitas pendidikan,
5. peningkatan aktivitas ekonomi.

Perbaikan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

3.6 Partisipasi dalam Evaluasi Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi memperoleh nilai paling rendah (70,8%). Sebagian besar responden menyatakan bahwa setelah proyek selesai dilaksanakan, masyarakat jarang dilibatkan dalam evaluasi formal maupun dalam penyusunan rekomendasi perbaikan.

Evaluasi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis, sehingga ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme evaluasi partisipatif.

3.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan wawancara, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias.

Tabel 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor	Persentase Responden (%)
Transparansi informasi	84,0
Kepemimpinan pemerintah desa	82,7
Kesadaran masyarakat	81,3
Tingkat pendidikan	76,7
Akses informasi	74,0
Kondisi ekonomi	69,3
Budaya gotong royong	86,0

Budaya gotong royong menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, kondisi ekonomi dan keterbatasan akses informasi masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal.



3.8 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah. Temuan ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Namun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencapai tingkat citizen power sebagaimana dijelaskan oleh Arnstein (1969). Keterlibatan masyarakat masih didominasi pada tahap konsultasi, sedangkan kewenangan dalam menetapkan prioritas pembangunan tetap berada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi agar masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan.

Temuan penelitian juga mendukung konsep good governance yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yaitu bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tingginya keterlibatan masyarakat berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan daerah.

Selain itu, budaya gotong royong yang masih kuat di Kabupaten Nias terbukti menjadi modal sosial penting dalam mendukung pembangunan. Modal sosial tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan informasi yang lebih terbuka, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses Musrenbang, serta pelibatan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil agar proses perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi masyarakat telah berada pada kategori tinggi, peningkatan kualitas partisipasi masih diperlukan, terutama pada aspek evaluasi pembangunan dan peningkatan pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan daerah di Kabupaten Nias diharapkan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Nias, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berada pada kategori tinggi, dengan nilai indeks partisipasi sebesar 77,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari penyampaian aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemanfaatan hasil

pembangunan, hingga evaluasi, meskipun tingkat keterlibatan pada setiap tahapan masih berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pemanfaatan hasil pembangunan memiliki tingkat partisipasi tertinggi karena masyarakat secara langsung merasakan manfaat pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, partisipasi dalam evaluasi pembangunan masih menjadi aspek yang relatif rendah dibandingkan dimensi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme evaluasi pembangunan belum sepenuhnya memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu budaya gotong royong, transparansi informasi, kepemimpinan pemerintah desa, tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan, akses informasi, serta kondisi ekonomi masyarakat. Budaya gotong royong menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong keterlibatan masyarakat, sedangkan keterbatasan akses informasi dan kondisi ekonomi masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias telah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun demikian, kualitas partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan transparansi proses perencanaan, perluasan akses informasi, serta pelibatan yang lebih aktif terhadap perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Nias.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Conyers, D., & Hills, P. (1994). *An introduction to development planning in the Third World* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata*



- cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah.* Kementerian PPN/Bappenas.
- Mikkelsen, B. (2011). *Methods for development work and research: A new guide for practitioners* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Slamet, M. (2003). *Membentuk pola perilaku manusia pembangunan.* IPB Press.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development.* United Nations Development Programme.
- World Bank. (1996). *The World Bank participation sourcebook.* World Bank.